

Drs. Jansen Hutasoit, SE, MM [Anggota DPR RI Komisi III]

# JAMINAN KEAMANAN BELUM TERWUJUD

**K**ALANGAN DPR mensinyalir, bahwa sejak reformasi sebenarnya masyarakat sudah mengharapkan polisi mereformasi diri secara cepat dan tepat. Tapi hingga sekarang ini, masyarakat masih menganggap reformasi di tubuh kepolisian terkesan lambat. Mungkin saja, di tingkat pimpinan atas sudah sesuai dengan kehendak para anggota DPR, khususnya komisi III. Namun di tingkat menengah ke bawah yaitu Polda, Polres hingga Polsek masih jauh dari apa yang disuarakan oleh jajaran petinggi Polri.

Akibatnya, hingga kini masyarakat masih belum merasakan adanya perbaikan jaminan keamanan dari aparat kepolisian. Baik keamanan diri dan harta benda. Indikasinya, masih sering terjadi tindak kriminal dan kekerasan, kendaraan hilang, dan masih ada pembunuhan. Banyak rumah yang digarong, bahkan polisi sendiri ada yang menjadi korban pembunuhan.

"Pada saat Hari Raya Idul Fitri 1427 H lalu, masyarakat juga merasa was-was meninggalkan rumahnya. Semua pejabat menganjurkan supaya mengamankan rumah-rumah yang kosong. Ini merupakan salah satu indikasi belum adanya perbaikan jaminan keamanan dari tahun-tahun sebelumnya. Kasus seperti itu tetap saja terjadi seperti tahun sebelumnya," ungkap salah seorang anggota Komisi III DPR-RI, Drs. Jansen Hutasoit, SE, MM. Belum lagi tindak kejahatan yang terjadi di jalanan. Seperti perampasan sepeda motor, perampokan nasabah bank, pencopetan di angkutan umum dan sebagainya.

Supaya jaminan keamanan masyarakat dapat terwujud, ia menekankan pimpinan Polri perlu turun langsung ke bawah, ke Polres dan Polsek-Polsek. Melakukan inspeksi secara langsung atau tidak langsung. Dan sebaiknya, ketika melakukan hal itu tanpa dikawal dan diketahui jajaran bawahan. Sebab bila diketahui, maka bawahan sudah menyiapkan laporan yang baik-baik. Dengan tanpa diketahui bawahan, maka pimpinan



akan tahu realitas sebenarnya seperti apa.

"Kalau *nggak* berani jalan sendiri karena faktor keamanan, itu artinya keamanan tidak terjamin. Kapolda tidak berani jalan sendiri tanpa dikawal misalnya, itu berarti jaminan keamanan tidak ada. Ini untuk membuktikan ada atau tidaknya jaminan keamanan di masyarakat. Mana, itu jaminan Keamanan masyarakat," tegas anggota FPDS ini.

Selain itu, polisi juga perlu membuka komunikasi dengan lapisan masyarakat. Kalau anggota DPR saja tidak bisa berkomunikasi dengan pimpinan Polri, HP selalu mail box, bagaimana rakyat bisa mengadu? Ketika masyarakat mengetahui tindak kejahatan misalnya, dan ingin melapor ke polisi, tapiu kalau HP atau telepon yang dituju tualait kan repot. Soalnya, masyarakat juga ingin langsung melapor ke pimpinan Polri.

## PELAYANAN PUBLIK

Menyangkut pelayanan publik, ia menyarankan supaya warga di daerah pinggiran kota metropolitan diberi kemudahan. Misalnya dalam mengurus surat-surat kendaraan bermotor. Waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hendaknya diberikan di luar jam kantor. Supaya pemilik mobil dan kendaraan tidak harus mening-

galkan aktifitas kerjanya. "Artinya, hendaknya pelayanan publik Polri disesuaikan dengan waktu yang dimiliki publik, yaitu di luar jam kerja publik," sarannya.

Kalau sekarang ini, pelayanan publik Polri dilakukan sama dengan waktu pelayanan publik. Artinya, kalau orang hendak ke kantor polisi harus bolos atau meninggalkan kerja. Jika Sabtu merupakan hari libur publik, justru sebaiknya Polri membuka pelayanan pada hari Sabtu. Atau Polri perlu menambah jam pelayanan masyarakat hingga pukul 22.00 WIB pada hari-hari biasa. "Kalau jam kerjanya sama, maka secara logika masyarakat akan menitipkan urusannya pada orang lain. Sebab tentunya mereka juga tidak ingin bolos kerja. Dan di sinilah celah timbulnya calo-calo itu,"

## Masalah Lalu Lintas

Harusnya, dari sekarang kendaraan roda dua diatur ketertiban berlalu-lintasnya. Kalau perlu mungkin diatur dengan Perda atau Peraturan Pemerintah (PP). Jangan nanti setelah semrawut, rumit, dan cenderung bebas, baru diatur. Tentu mereka akan melakukan perlawanan yang keras. Sekarang ini saja pengendara motor sudah seperti raja jalanan. Mah potong kanan, kiri, pindah jalur. Main serobot sembarangan tiba-tiba di depan mobil. "Saya memang belum tahu pasti statistik kecelakaan sepeda motor. Tapi kalau melihat fenomena gaya bersepeda motor, memang sudah mengkhawatirkan," katanya.

Satu hal yang juga penting, hendaknya diperiksa bahan bakar kendaraan untuk mengetahui bahan bakar yang bebas timbal. Sebab bahan bakar bertimbal dapat meracuni otak. Kalau otak pengendara motor sudah rusak, maka nasib bangsa ini akan dibawa ke mana?. Daya pikir menjadi rendah. Masalah ini memang sifatnya menyeluruh. Jadi tidak hanya di Polda Metro Jaya saja.

Dia menekankan, pelayanan polisi hendaknya dapat mendekati masyarakat. Kalau dulu Polsek yang kecil dijadikan Polres, sekarang ini bila perlu memperbesar, memperkuat dan memperbanyak personilnya di tingkat pos polisi (Pospol). Misalnya, di tingkat RW tertentu didirikan pos polisi. Dengan adanya pos polisi di tingkat RW, maka pos polisi tersebut dapat langsung memprosesnya bersama-sama dengan petugas Hansip, Ketua RT dan ketua RW setempat. "Saya kira ini tidak mahal. Polisi tinggal menyiapkan personilnya. Sedangkan fasilitas sarananya disiapkan oleh pihak Desa atau kelurahan," tegasnya. [Rusnohadi/jt-02]